KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

XVEMDPB6

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK										
									Final Tidak Final	
A. ID	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG						
A.1 I	A.1 NPWP :									
A.2 NIK : TITITITITI										
A.3 Nama : DINI ADRIYANTI										
- DINIADRITANTI										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01		14.355.000		14.355.000		0	5	717.750		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8	Dokumen Re									
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.  Nomor: Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan:  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2	Nama Instan	Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							TIMUR	
C.3	ID Subunit C	Organisasi :			op					
C.4	Tanggal	:	1 1	dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy				_	
C.5	Nama Penan	ma Penandatangan : RIANDY								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya			
				dengan ketentuan yang ik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jender lukan tanda tangan.	al Paja	k mengatur bahwa (	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	